

ANALISIS YURIDIS KEUANGAN PUBLIK DAN KEUANGAN
PRIVAT PADA PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

TESIS

Oleh :

MIKAEL PH TOGATOROP
047005039/HK



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2006

YURIDICAL ANALYSIS OF PUBLIC AND PRIVATE FINANCIAL IN FINANCIAL AUDITING BOARD

Mikael PH Togatorop*
Bismar Nasution**
T.Keizerina Devi.A**
Faisal A. Nasution**

ABSTRACT

Management of government wheel in a state largely needs financial as a means of improving the people welfare, and there should be a reasonable budget with effective and efficient allocation and spending. The financial Auditing Board as a height institution of state recommended by Constitution 1945 in auditing the state financial must comply with the regulation and laws tightly to prevent some breach and authority abuse for personal or group interest from occurring.

The research is conducted to answer the problem about implementation, the spending or use of state financial managed by the government and state-owned corporation to improve people and public interest. The collection of data in this research is by analytical descriptive, a technique is accomplished through normative juridical research uses the secondary data resulting from library research and it is then analyzed quantitatively.

The result of research indicates that The Financial Auditing Board in performing the function as State Financial Auditor is still facing some obstacles, because there is a controversial statute.

An alternative taken by State Financial Auditor to settle the problem of auditing is to take the assertive measures according to the laws and law enforcement. i.e. the Law No.5 of 1973 regarding the financial .Auditing Board chapter 3, and there should be procedure of conducting the audit and another statute to create both welfare and prosperous peoples and clean and responsible government, in addition, Financial Auditing Board needs to improve both facilities and skill including the education and courses related to legal science to improve the human power.

Keywords: Public and Private Financial
Financial Auditing Board

* Postgraduate Student of Law Magistar North Sumatera University

** Postgraduate Professor of Law Magistar North Sumatera University

ANALISIS RIMS KEIJANGAN PUBLIK DAN
KELJANGAN PRIVAT PADA PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Mikael PH Togatorop*
Bismar Nasution**
T.Keizerina Devi.A**
Faisal A. Nasution**
Intisari

Dalam melaksanakan roda pemerintahan suatu negara membutuhkan keuangan negara sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dibutuhkan anggaran yang besar serta usaha agar keuangan negara dapat digunakan secara efektif dan efisien. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara yang di rekomendasikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga penyelewengan dan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan dapat di selesaikan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan, penggunaan keuangan Negara yang dikelola pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara untuk mensejahterakan masyarakat dan kepentingan umum. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan Yuridis normative yaitu melakukan analisis terhadap azas-azashukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pemeriksa Keuangan Negara masih mengalami hambatan karena adanya perundang-undangan yang saling bertentangan.

Salah satu jalan untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah dengan melakukan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang dan penegakan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, tentang BPK Pasal 3 dan perlu adanya peraturan perundang-undangan tentang tata cara melakukan pemeriksaan dan perundang-undangan lainnya

untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Disamping itu Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan prasarana dan sarana berupa pendidikan atau kursus-kursus yang menyangkut ilmu hukum bagi peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki.

Kata Kunci: Keuangan Publik dan Keuangan Privat
Pemeriksaan BPK

- * Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Flukum Universitas Sumatera Utara
- ** Dosen Sekolah Pascasarjana Magister flukum Universitas Sumatera Utara

